

## Presiden Jokowi: Dunia Saat Ini Menuju Neraka Iklim, Hati-Hati

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa dunia saat ini menuju ke 'neraka iklim'. Hal tersebut disampaikan Jokowi mengutip pernyataan Sekjen PBB.

"Saya kira bapak ibu semuanya sudah mendengar warning dari sekjen PBB bahwa dunia menuju pada neraka iklim, ngeri, neraka iklim. Suhu akan mencapai rekor tertinggi pada 5 tahun ke depan, hati-hati!" kata Jokowi dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award di Istana Negara, Jumat (14/6) pagi.

Jokowi mengatakan bahwa dalam satu tahun terakhir masyarakat Indonesia termasuk dirinya, tengah merasakan betul adanya gelombang panas.

Tidak hanya di Indonesia, Jokowi menyebut panas di India mencapai 50 derajat Celcius, bahkan di Myanmar 45,8 derajat Celcius.

"Kalau orang panas mungkin bisa masuk ke rumah, berteduh, bisa. Tapi urusan pangan, hati-hati masalah ini," kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan bahwa FAO menyebut jika suhu panas tersebut terus menerus ditiadakan dan tidak ada pergerakan, maka pada tahun 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat.

"Ini yang harus direncanakan, diantisipasi sejak mulai sekarang. Karena diperkirakan 50 juta petani akan kekurangan air, gak ada air. Dan akan masuk kepada tadi kekurangan pangan," jelasnya.

Maka dari itu, Jokowi mewanti-wanti kepada semua pihak agar tidak bermain-main dengan urusan kekeringan. Sebab akan berdampak pada produksi yang berkurang serta stok yang tidak ada mengakibatkan kenaikan inflasi.

"Dan itu adalah urusan kehidupan, urusan kehidupan manusia. Sekali lagi begitu produksi karena panas, urusan air gak kita urus, produksi turun, stok menipis, otomatis harga pasti naik, otomatis juga inflasi pasti akan naik lagi. Rentetan ini yang harus diantisipasi, direncanakan dan korbannya sekali lagi rakyat," ungkapnya. ● mar

## PT Jakarta Perberat Hukuman Dadan Penyup Sekretaris MA Jadi 9 Tahun

JAKARTA (IM) - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman Dadan Tri Yudianto, penyup Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hsan, menjadi sembilan tahun penjara.

Sebelumnya, Pengadil Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum Dadan 5 tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama sembilan tahun," tulis putusan PT DKI Jakarta yang termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Dadan juga dikenai membayar denda Rp1 miliar. Namun, besaran tersebut masih sama dengan putusan di pengadilan tingkat pertama.

Selain itu, Dadan juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp7.950.000.000 (Rp7,9 miliar) dengan memperhitungkan harta benda yang telah disita berdasarkan barang bukti, sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap semuanya dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Apabila hasil lelang melebihi uang pengganti, maka sisanya dikembalikan kepada Terpidana, namun apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar kekurangan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud, dan Terpidana tidak membayar kekurangannya sesuai batas sesuai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti sebagaimana dimaksud.

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar kekurangan Uang Pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun," tulis SIPP. ● han

## Direktur Keuangan PT Taspen Diperiksa KPK Soal Investasi Bodong

JAKARTA (IM) - Penyidik KPK memanggil Direktur Keuangan PT ASABRI yang merupakan mantan Direktur Keuangan PT Taspen, Helmi Imam Satriyono, untuk diminta keterangannya terkait dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen, Jumat (14/6).

Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan, jadwal pemeriksaan dilakukan hari ini di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/6).

Namun Tessa belum memerinci materi apa yang akan digali dari saksi tersebut nantinya.

"Hari ini (Jumat, 14/6) dijadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK kegiatan investasi fiktif di lingkungan PT Taspen," kata Tessa dalam keterangannya, Jumat (14/6).

"Atas nama Helmi Imam Satriyono, Direktur Keuangan PT ASABRI (eks Direktur Keuangan

PT Taspen Oktober 2018 sampai Januari 2020)," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih sebagai tersangka kasus dugaan korupsi investasi fiktif alias bodong di PT Taspen.

Antonius hari ini juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

"Perkara Taspen sekarang sedang berjalan, berlangsung. Tadi juga salah satu ininya dipanggil, terangnya, seperti itu," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/5) lalu.

Asep tak menjelaskan materi pemeriksaan terhadap Antonius tersebut. Dia mengatakan hal itu akan diungkap dalam persidangan. ● mei

# 2 | Polhukum

FOTO: ANTARA



## SEKOLAH HUKUM PDI PERJUANGAN

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi Guru Besar Hukum Tata Negara UII Mahfud MD (kiri) dan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat (kanan) memberikan paparan saat Sekolah Hukum bagi calon anggota legislatif terpilih 2024 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6).

# Staf Sekjen PDIP Ngaku Dibentak Penyidik, KPK Siap Membuka Rekaman CCTV

Pengakuan Kusnadi yang dibentak petugas KPK, dan bukti rekaman pemeriksaan akan diuji di Dewan Pengawas (Dewas) hingga Komnas HAM.

JAKARTA (IM) - Staf Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, mengaku trauma karena dibentak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait hal ini, KPK siap membuka rekaman CCTV saat pemeriksaan Kusnadi.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan, pihaknya menerapkan prosedur operasional baku (POB), dan memperkakan semua saksi dan terduga dalam pemeriksaan dengan baik.

"Kan, dilaporkan juga, nanti kan diuji. Ini, kan, ada CCTV-nya, nanti kan bisa

dilihat di sana. Kita, kan, diuji di, apa namanya, di Komnas HAM diuji tadi di Dewas, kemudian di, yang lainnya," kata Asep dikutip dari kanal YouTube KPK RI, Jumat (14/6).

Asep mengatakan, pengakuan Kusnadi dan bukti rekaman pemeriksaan akan diuji di Dewan Pengawas (Dewas) hingga Komnas HAM. Sebab setelah pemeriksaan dan penyitaan sejumlah barang dalam pemeriksaan, Hasto dan Kusnadi mengadukan KPK ke Dewas sampai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Saksi KS (Kusnadi) katanya takut dibentak-bentak lagi. Jadi, sejauh ini rekaman kan mungkin sudah puluhan tahun ada di sini, sudah ratusan orang, bahkan ribuan orang yang hadir di sini, sudah ratusan orang yang diperiksa di sini," ujar Asep.

Asep menyampaikan, Kusnadi dipanggil untuk dikonfirmasi mengenai barangnya yang turut disita penyidik bersama ponel Hasto pada Senin, 10 Juni 2024.

"Kepentingan kami memanggil Pak KS ini, karena, memang juga ada barangnya yang kami sita juga, dari yang bersangkutan. Dan itu akan ditanyakan," ucap Asep.

"Artinya, akan diklarifikasi terhadap apa yang ada di dalamnya," kata Asep.

Kusnadi adalah staf Hasto yang didelegasikan penyidik KPK saat diperiksa sebagai

saksi kasus suap dengan tersangka Harun Masiku pada Senin (10/6) lalu. Dalam kasus ini, Harun Masiku adalah tersangka kasus dugaan suap terhadap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.

Harun diduga menyuap Wahyu untuk memuluskan jalannya menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu. KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini.

Selain Wahyu dan Harun, ada juga kader PDI-P Saeful Bahri dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.

Dalam kasus ini, Wahyu, Saeful, dan Agustiani telah divonis dan dinyatakan bersalah. Sedangkan, Harun masih berstatus buronan setelah lolos dari operasi tangkapan pada Januari 2020 lalu. ● han

## Istana Telah Terima Draf RUU TNI dan Polri, Sedang Proses Telaah

JAKARTA (IM) - Istana Kepresidenan sudah menerima draft rancangan undang-undang (RUU) TNI dan Polri. Hal tersebut dibenarkan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono.

"Betul (telah menerima draft RUU TNI dan Polri)," kata Dini dalam keterangannya dikutip Jumat (14/6).

Dini menjelaskan draft RUU tersebut telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada minggu lalu. Dan saat ini masih dalam proses penelaahan.

"RUU terkait sudah diterima oleh Setneg hari Jumat siang minggu lalu. Saat ini masih dalam penelaahan untuk proses selanjutnya," kata Dini.

Perlu diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui empat revisi undang-undang menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (28/5/2024). Salah satu RUU yang disetujui menjadi inisiatif DPR yakni UU Kementerian Negara.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, 9 fraksi DPR telah menyampaikan pendapat masing-masing terhadap 4 RUU usulan Badan Legislasi. Keempat RUU itu terdiri dari RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, RUU tentang Perubahan atas UU No.39 Tahun 2008 tentang Negara.

Kemudian, RUU tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan RUU tentang Perubahan Ke-3 atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Contohnya untuk RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti Bintara dan Tamtama batas usia pensiun 58, Perwira 60 tahun dan Bintara dengan kebutuhan organisasi berusia 60 tahun dengan mekanisme sendiri dan apabila memiliki keahlian khusus batas usia pensiun dapat diperpanjang maksimal 2

tahun," ujarnya.

"Demikian contohnya, apa dapat disetujui?" tanya Dasco kepada seluruh anggota dewan yang hadir.

"Setuju," ujar anggota dewan yang hadir.

Selanjutnya, Dasco kembali meminta persetujuan agar RUU usulan tersebut dibahas ke tingkat selanjutnya oleh DPR RI.

"Dan kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah 4 RUU inisiatif Badan Legislasi DPR RI, a. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; RUU tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; RUU tentang Perubahan Ke-3 atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI, apakah dapat disetujui?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab anggota DPR. ● mei

FOTO: ANT



## PEMERIKSAAN LANJUTAN ADHI PRAMONO

Tersangka mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Makassar Adhi Pramono (kiri) menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/6). Ia menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan TPPU terkait pengurusan barang ekspor impor di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Makassar.

## Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi

JAKARTA (IM) - Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) sedang memeriksa prajurit Brigade Infanteri (Brigif) 3, Letda R, yang diduga menyelewengkan dana satuan untuk main judi online. Letda R saat ini sedang menjalani pemeriksaan dan ditahan.

"Betul, proses hukum masih berjalan," kata Kepala Penerangan Kostrad Kolonel (Inf) Hendhi Yustian Danang Suta, melalui pesan tertulis, Jumat (14/6).

Kostrad memeriksa Letda R, terutama soal kemungkinan aliran dana yang diselewengkan ke prajurit-prajurit lain.

"Semua kemungkinan (sedang) dialami. Kasus diproses secara hukum," tutur Hendhi.

Dalam laporan yang beredar melalui pesan berantai, Letda R diduga menyelewengkan dana satuan sebanyak Rp 876 juta.

Laporan yang sama me-

nyebutkan, Letda R ketahuan mulai menyelewengkan dana sejak Agustus 2023.

"Kostrad menegaskan bahwa setiap bentuk perjudian, baik konvensional maupun online melanggar hukum dan kode etik militer. Adapun setiap anggota yang terbukti terlibat akan diproses hukum sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku," kata Hendhi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto sebelumnya meminta pimpinan TNI dan Polri untuk mengawasi anggota agar tidak terjerat judi online.

"Kami mengimbau kepada seluruh pimpinan Kementerian/lembaga, termasuk TNI-Polri juga kerap memberikan perhatian khusus kepada seluruh jajarannya supaya tidak terjebak judi online," kata Hadi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (13/6). ● mei



## PENUNTASAN PEMBANGUNAN HUNTAH DI PALU

Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) mendengarkan penjelasan dari Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Irwan Suprijanto tentang pembangunan huntap di Palu, Sulteng, Jumat (14/6). Menko PMK menegaskan, pembangunan huntap bagi para penyintas bencana gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala yang ditargetkan sebanyak 5.598 unit dan telah terbangun 5.216 unit.